

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena industrialisasi telah merasuki sebagian besar aspek kehidupan, hal ini terjadi karena adanya kemajuan yang pesat di masyarakat. Stabilitas politik yang terjamin, ekonomi, dan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempercepat kemajuan masyarakat. Bahkan telah terjadi pergeseran yang bersifat imperatif, dari era industri ke era informasi. Hal tersebut khususnya terjadi pada negara industri baru di Asia, sebagaimana yang telah terjadi di Jepang, Korea Selatan, Hongkong, dan Singapura, justru memunculkan banyak perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kemajuan yang terjadi di masyarakat didukung oleh sistem kebijakan pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan rakyat. Menurut Akmal Hawi, pendidikan merupakan masalah penting bagi bangsa, terlebih lagi bagi bangsa yang berkembang dan pendidikan adalah bentuk kerjasama yang tidak pernah selesai serta apabila kita mengingat masa sekarang, kita akan mengetahui dunia telah banyak mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan maupun teknologi.¹

¹ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 67.

Undang - Undang No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik untuk melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya dimasa yang akan datang”. Pada hakekatnya yang disebut dengan pendidikan adalah pengaruh bimbingan, arahan dari orang dewasa kepada anak yang belum dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang. Kepribadian yang dimaksud adalah semua aspek yang meliputi cipta, rasa, dan karsa.²

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam totalitas kehidupan manusia yang bertujuan untuk membantu generasi muda mengembangkan semua unsur potensi pribadinya baik spiritualitas, moralitas, sosialitas, rasa, maupun rasionalitas. Jadi pendidikan merupakan suatu hak setiap pribadi yang memungkinkan dirinya akan menjadi manusia yang berkepribadian paripurna di tengah derasnya arus perubahan zaman.³

Pendidikan pada dasarnya tidak akan berakhir meskipun anak telah dewasa atau telah berkeluarga, sehingga dapat diartikan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Maksudnya, setelah dewasa orang tersebut tetap akan belajar terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya, namun kegiatan itu atas tanggung jawab sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Sedangkan pendidikan yang berlangsung di keluarga adalah sebagai

² Zainal Aqib, Elham Rohmanto, *Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah* (Bandung: CV. Yrama Widya, 2007), hal. 14.

³ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 2.

pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal yang berlaku seumur hidup.

Pendidikan agama Islam hadir bertujuan untuk menjadikan seseorang sebagai *insan kamil* atau yang berkepribadian paripurna di tengah derasnya arus perubahan zaman, maka untuk mewujudkan hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan seseorang dapat mengalami kenaikan atau penurunan, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan Islam untuk menjaga ketakwaan seseorang atau meningkatkannya.

Haidar Putra Daulay dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Islam* mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan dengan tujuan untuk membentuk pribadi muslim yang *kamil*, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.⁴ Di samping itu, Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. selama hidupnya, dan matipun tetap dalam keadaan Muslim.⁵ Pendapat ini didasari firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۤ وَلا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝۱۰۲

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”.*⁶

⁴ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 153.

⁵ Akmal Hawi, *Op.Cit.*, hal. 20.

⁶ QS. Ali Imran [3]: 102.

Maksud dari ayat di atas, bahwa mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Swt. inilah yang merupakan ujung dan akhir dari proses hidup serta merupakan isi kegiatan pendidikan. Inilah akhir dari proses pendidikan yang dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah inilah merupakan tujuan akhir pendidikan khususnya pada pendidikan agama Islam.

Pada batang tubuh UUD 1945 pasal 31 disebutkan bahwa: “(ayat 1): tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan (ayat 2): pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 1 sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU”. Ayat pertama memberikan petunjuk kepada kita bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, sedangkan pada ayat kedua memberikan petunjuk bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.⁷

Berdasarkan kebijakan yang ada itu maka diperlukan suatu upaya untuk mengikis kebodohan dalam seluruh segmen masyarakat Indonesia. Dalam pembuatan kebijakan tersebut para penyelenggara pendidikan bukan hanya birokrat atau pejabat pendidikan tingkat pusat saja, akan tetapi pejabat birokrasi pendidikan di daerah baik provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan sampai kepada kepala sekolah sangat perlu memahami akan jaringan kebijakan dalam pendidikan.

⁷ Syafaruddin, *Op.Cit.*, hal. 111.

Sistem persekolahan di Indonesia merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Karena itu keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dalam spektrum kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus mampu melahirkan gagasan yang inovatif, ia harus dapat mengenal dan mengerti berbagai kedudukan, keadaan dan apa yang diinginkan oleh guru maupun pegawai lainnya, sehingga akan tercipta kerjasama yang baik dalam proses penyelenggaraan pendidikan.⁸ Selain itu, kepala sekolah juga dituntut untuk mampu menganalisa kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan atau akan dijalankan. Jika kepala sekolah mampu menganalisa kebijakan-kebijakan dengan baik, maka efektifitas kinerja juga dapat ditingkatkan.

Pada konteks pendidikan seorang kepala sekolah berperan sebagai pimpinan, manajer, pendidik, pengawas, dan pendorong bagi guru-guru dalam proses pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan pendidikan perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas guru atau pendidik. Guru berinteraksi dengan sesama guru dan murid dalam kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Demikian pula ada pola komunikasi di dalam interaksi sekolah sebagai inti kegiatan kemanusiaan mengembangkan potensi anak didik atau pelajar.

⁸ Marno, *Islam By Management and Leadership, Tinjauan Teoritis dan Empiris Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam* (Malang: Lintas Pustaka, 2007), hal. 59.

Usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas guru yaitu misalnya dengan mengikutkan guru-guru pada seminar, studi banding dengan sekolah lain, atau dengan membuat kebijakan-kebijakan yang melibatkan guru secara aktif pada acara-acara yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Seorang guru yang baik dapat meningkatkan, mengembangkan kualitas dan potensi peserta didiknya. Sesuai dengan RUU guru yang memiliki nilai “pembaharuan” untuk mendukung profesionalisme dan kesejahteraan guru, maka guru harus memenuhi beberapa kompetensi yang harus dimiliki.

Adapun dalam hal tersebut terdapat beberapa substansi RUU guru yang memiliki nilai “pembaharuan” ini antara lain:⁹

- a. Kualifikasi dan kompetensi guru: yang mensyaratkan kualifikasi akademik guru minimal lulusan S1/Diploma IV dengan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.
- b. Hak guru yang merupakan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru (pasal 15 ayat 1).
- c. Kewajiban guru adalah untuk mengisi keadaan darurat, adanya wajib kerja sebagai guru bagi PNS yang memenuhi persyaratan.
- d. Pengembangan profesi guru: melalui pendidikan guru yang lebih berorientasi pada pengembangan kepribadian dan profesi dalam satu lembaga pendidikan guru yang terpadu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat dibutuhkan seorang pemimpin profesional yang nantinya akan dapat memajukan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus meningkatkan segala sumber dan potensi yang ada di sekolah dengan lebih baik. Di dalam proses belajar mengajar seorang guru adalah seorang prajurit terdepan di dalam

⁹ Zainal Aqib, *Op.Cit.*, hal. 147-148.

membuka cakrawala peserta didik memasuki dunia ilmu pengetahuan dalam era global ini. Maka menurut UU No. 14 Tahun 2005 bahwa kualifikasi akademik guru profesional harus mempunyai sekurang kurangnya ijazah S-1.¹⁰

Pelaksanaan pendidikan yang dilakukan di sekolah sebagai bentuk formal pasti melibatkan seorang guru bagi anak didiknya. Dalam hal ini telah diketahui bahwa seorang guru sangat berperan dan memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Minat, bakat, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan seorang guru. Seorang guru dapat membantu peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.

Sehubungan dalam hal ini, seorang guru harus mempunyai beberapa kompetensi dasar untuk dapat membantu dalam perkembangan peserta didiknya. Seorang guru juga harus kreatif, profesional, dan menyenangkan. Akan tetapi, pada kenyataan sekarang ini masih terdapat guru-guru yang kurang profesional di bidangnya. Terdapat berbagai masalah dalam pengembangan kompetensi seorang guru, di antaranya kurangnya kesejahteraan guru sehingga menjadikan guru tersebut kurang semangat dalam mengajar, guru tidak berkompeten di bidangnya, etos kerja guru rendah atau tidak profesional.

Seorang guru yang progresif harus mengetahui dengan pasti kompetensi yang ada padanya. Setelah guru tersebut mengetahui kompetensi

¹⁰ Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 167.

yang harus ia miliki, maka dapat dijadikan suatu pedoman untuk mengembangkan kompetensi yang harus ada dan meneliti kompetensi yang belum ada pada dirinya. Apabila ia belum mempunyai kompetensi yang layak, maka ia harus belajar dan bersedia untuk menyempurnakan segala aspek apa saja yang belum ia miliki.

Pendidik atau guru adalah sebagai agen pembelajaran, dalam pasal 28 ayat 3 dijelaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini harus memiliki kompetensi, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.¹¹

Menurut Gorton bahwa “Perangkat sekolah seperti kepala sekolah, dewan guru, siswa, pegawai/karyawan harus saling mendukung untuk saling bekerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.¹² Untuk itu dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung atas kemampuan pemimpinnya dalam menumbuhkan iklim kerja sama agar dengan mudah dapat menggerakkan sumber-sumber atau resources yang ada sehingga dapat mendayagunakannya dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sehubungan dalam hal ini, kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat penting. Seorang pemimpin atau kepala sekolah harus mempunyai jiwa kepemimpinan, jiwa kreatif dan inovatif. Salah satunya yaitu dengan

¹¹ Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hal. 96.

¹² Marno, *Op.Cit.*, hal. 48.

memberdayakan kompetensi guru secara lebih baik untuk pengembangan sekolahnya, dimana seorang kepala sekolah dapat membuat suatu kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kompetensi guru di sekolah yang sesuai dengan UU pada pasal 28 ayat 3 seperti yang tertera di atas. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai suatu kebijakan yang mengarah pada kemajuan sekolah tersebut dengan cara meningkatkan pengembangan kompetensi guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk menjadikan peserta didik akan lebih baik dalam kualitas pendidikannya.

Wahjosumidjo menyatakan bahwa kepala sekolah yang berhasil adalah mereka yang memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranannya sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.¹³ Sedangkan Dede Rosyada menegaskan bahwa sekolah akan mencapai penampilan terbaik jika dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang kuat, konsisten, demokratis, dan berani mengambil putusan-putusan strategis tanpa ragu.¹⁴

SDN Dampit 06 Malang merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di daerah Dampit, kabupaten Malang, dimana masyarakat berharap bahwa sekolah tersebut akan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya dari segi akademis maupun non akademis. Sebagai pendidikan formal, SDN Dampit 06 Malang mempunyai potensi untuk berkembang sebagai

¹³ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82.

¹⁴ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: 2004), hal. 234

lembaga pendidikan yang mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Sebagaimana informasi yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan pra-observasi dengan mewawancarai bapak Wiji, S.Pd, M.M selaku kepala sekolah di SDN Dampit 06 Malang, beliau mengatakan bahwa SDN Dampit 06 Malang memiliki guru-guru yang kreatif serta disiplin, sehingga mereka dapat menjadi contoh bagi siswa-siswi agar mengembangkan kreativitas mereka dan disiplin terhadap banyak hal serta beliau mengemukakan bahwa kepala sekolah sangat berperan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran serta mutu dari tenaga pengajarnya, sehingga jika tenaga pengajarnya semakin berkualitas maka akan terlaksana kegiatan pembelajaran yang bermutu. Maka pada akhirnya akan terbentuk citra yang positif di mata masyarakat.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih jauh tentang bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah terhadap peningkatan kompetensi guru khususnya guru PAI di SDN Dampit 06 Malang. Maka peneliti mengangkat judul, “Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru PAI di SD Negeri Dampit 06 Malang”.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Wiji, S.Pd, M.M (selaku kepala sekolah di SDN Dampit 06 Malang) di Dampit-Malang, tanggal 20 November 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian adalah implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI. Oleh karena itu, dapat dirumuskan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Kebijakan apa yang dibuat kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SD Negeri Dampit 06 Malang?
2. Bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SD Negeri Dampit 06 Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SD Negeri Dampit 06 Malang.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SD Negeri Dampit 06 Malang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pengembangan keilmuan di institusi akademis, masyarakat, atau *stakeholders* yang lainnya. Adapun secara detail manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoretis

Pembahasan implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan menambah cakrawala berfikir dalam dunia pendidikan ataupun institusi pendidikan, terutama memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan sebagai suatu wacana tentang implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di sekolah. Serta dapat memberi masukan dan informasi secara teori dan penelitian ini sesuai dengan tema judul skripsi, utamanya masalah implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis yaitu bagi perkembangan pendidikan agama Islam, sebagai upaya menggali pendekatan dan metode dalam pengembangan pendidikan agama Islam melalui implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di Sekolah Dasar.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian tentang implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membangun maupun mempertahankan citra positif lembaga di masa yang akan datang sekaligus memberikan masukan kepada kepala sekolah terhadap lembaga-lembaga

pendidikan untuk dijadikan masukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan khususnya juga kompetensi guru PAI. Serta memberi solusi dan bahan panduan pada dunia pendidikan khususnya kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinannya tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada anggotanya terutama kepada peserta didik sehingga dapat mencetak generasi muda yang memiliki *akhlakul karimah* dan dapat diharapkan oleh agama, nusa, dan bangsa.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga, dan sangat bermanfaat bagi peneliti yang dapat dijadikan sebagai tambahan khazanah pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya yang menjadikan harapan peneliti sebagai pemimpin atau sosok kepala sekolah yang penuh dengan kreativitas dan keaktifan dalam memajukan dunia pendidikan serta upaya peningkatan mutu pendidikan, guna menambah wawasan tentang implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI di SDN Dampit 06 Malang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan suatu masukan ide-ide yang kreatif dan inovatif pada kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi guru khususnya guru PAI. Dengan demikian dapat berguna untuk menjadikan peserta didik yang berbekal IPTEK dan

IMTAQ. Sekaligus sebagai suatu bahan rujukan dalam melakukan refleksi pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik.

E. Batasan Istilah

1. Kebijakan

Menurut kamus Oxford, kebijakan berarti “rencana kegiatan” atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Kebijakan di sini terkait dengan kebijakan publik (*public policies*) dan dibuat atas nama negara (*state*) oleh instrumen/alat-alat negara untuk mengatur perilaku tiap orang, seperti guru atau siswa dan organisasi, seperti sekolah dan universitas.¹⁶

Kebijakan pada umumnya dapat dipahami melalui beberapa pendekatan, misalnya melalui pendekatan metodologi atau metode konseptual. Pendekatan metodologi digunakan untuk melembagakan analisis kebijakan dan mekanisme institusional, sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang ditujukan untuk melahirkan manfaat dari konsep dan teori dalam berbagai disiplin ilmu sosial untuk memecahkan suatu masalah. Oleh karena itu, kebijakan sangatlah penting dalam suatu sistem karena kebijakan mengendalikan keseluruhan dari suatu organisasi sekolah.

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kearifan atau kebijakan dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah

¹⁶ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Cet. II (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 131-132.

kepada bawahan dengan tetap memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan maupun sebuah usaha untuk menciptakan keadaan baru dengan melibatkan semua personel yang ada didalam sekolah, dan kepala sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kebijakan baru tersebut, karena kebijakan baru tersebut harus lebih berkualitas dan inovatif. Suatu kebijakan sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siswa dan para guru karena sangat berkaitan dengan pembelajaran dalam rangka peningkatan efektivitas sekolah. Yakni lebih tepatnya pada peningkatan kompetensi guru PAI dalam kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah.

2. Kepala Sekolah

Kepala sekolah terdiri dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata “kepala” dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang “sekolah” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Maka kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.¹⁷

Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah.¹⁸

Dengan penjelasan guru yang tugas utamanya adalah sebagai pendidik dan memiliki tugas tambahan yaitu sebagai pemimpin sekolah.

¹⁷ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal. 83.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: 1976), hal. 482.

Kepala sekolah yang dimaksud oleh peneliti adalah seorang pemimpin institusi pendidikan yang memiliki gaya kepemimpinan terhadap warga sekolah sehingga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan sekolah.

3. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 disebutkan “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.¹⁹ Seorang guru yang baik harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.²⁰

Peneliti menjabarkan arti dari kompetensi guru dalam penelitian ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yang profesional. Guru yang profesional harus memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan kompetensi yang membutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam dirinya.

4. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk

¹⁹ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 23

²⁰ Nadlifah, dkk, *Buku Pedoman PPL II* (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2007), hal. 11-14.

meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas, PAI sangat penting dalam membimbing dan mengasuh peserta didik agar nantinya ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam secara menyeluruh dan menjadikan ajaran agama Islam sebagai pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Seorang guru PAI diharapkan dapat menerapkan kemampuannya baik secara emosional, inteligensi, dan spiritual sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara baik, efektif dan efisien.

Peneliti menjabarkan arti dari PAI dalam penelitian ini adalah bimbingan secara sadar dan terus menerus yang sesuai dengan kemampuan dasar peserta didik yang bertujuan untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan agama Islam secara hakiki.

²¹ Abdul Majid, dkk, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2004), hal. 132.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang dapat dimengerti, menyeluruh dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka peneliti akan menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan. Sistematika penulisan yang digunakan peneliti dibagi menjadi lima bab, yang didahului dengan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, serta dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas seputar penjelasan dan gambaran masalah umum terkait penelitian. Dalam bab ini terdapat sub-sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini peneliti akan membahas kerangka teoritis sesuai dengan bahasan judul skripsi. Dalam kajian teoritis yang sesuai dengan kata kunci permasalahan dalam penelitian ini meliputi: Tinjauan tentang kebijakan kepala sekolah, dilanjutkan dengan tinjauan tentang kompetensi guru PAI, serta kajian tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru PAI.

3. BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini peneliti akan membahas metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini, yaitu mengenai metode yang dipakai untuk penelitian dan pengumpulan data, maupun metode yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian. Metode penelitian yang dimaksud meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan hasil penelitian.

4. BAB IV: Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan membahas dan menyajikan data-data hasil penelitian, serta menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti di lapangan. Mengemukakan gambaran umum tentang obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan analisis data.

5. BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Bab ini menjelaskan secara global dari semua pembahasan dan memberi beberapa saran dalam meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Tujuannya mempermudah pembaca untuk mengambil inti sari dari pembahasan skripsi ini. Sehingga kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebagai temuan baru. Sedangkan saran tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.